



Politik Pembangunan Islam terhadap Model Kota Madani Banda Aceh

Maulida Ulfa* & Warjio

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima September 2017; Disetujui November 2017; Dipublikasikan Januari 2018

Abstrak

Studi ini adalah studi tentang politik pembangunan Islam terhadap model kota madani di Banda Aceh. Fokusnya membahas tentang latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh serta program dan juga tantangannya. Temuan studi ini antara lain terdapat tiga hal penting dalam hal ini. Pertama, pihak pemko Banda Aceh yakni Walikota dan Wakil Walikota yang menggagas ide mengenai Banda Aceh model kota madani, dimana konsepnya merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Kedua, para aktor politik yang terlibat berupaya agar program yang dijalankan tetap berdasarkan syariat Islam. Ketiga, para aktor politik masih memiliki kendala dan tetap harus berupaya agar dapat mewujudkan Banda Aceh model kota madani. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Kata Kunci: Model Kota Madani Banda Aceh, Politik Pembangunan Islam, Program dan Tantangan

Abstract

This study is about the development of political Islam against a model city of madani in Banda Aceh. The focus of this study discusses the background and the concept model of the city of Banda Aceh and programs and also the challenges. The findings of this study, among others, there are three important points. First, pemko Banda Aceh namely the Mayor and Vice Mayor who initiated the idea of the model of the city of Banda Aceh, where madani concept refers to what the Prophet had done in Madinah. Second, the political actors who involved in order to make the program run attempts to remain based on Islamic Shari'a. Third, the political actors still have constraints and should still be sought in order to realize Banda Aceh as a model of madani city. The method used is descriptive method.

Keywords: Development of Political Islam, Model City of Madani Banda Aceh, Programs and Challenges

How to Cite: Ulfa, M. & Warjio. (2017), Politik Pembangunan Islam Terhadap Model Kota Madani Banda Aceh, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10 (1): 17-23.

*Corresponding author:

E-mail: maulidaufaufa@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk membangun Banda Aceh sebagai model kota madani, pembangunan yang dijalankan yaitu pembangunan berteraskan Islam. Menurut Muhammad Syukri Salleh, pembangunan yang berteraskan Islam adalah pembangunan yang bergabung antara dua bentuk pembangunan; pembangunan material dengan pembangunan kerohanian dan dilaksanakan menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam (Warjio, 2013). Peran pemerintah kota (Walikota dan Wakil Walikota) selaku salah satu aktor politik atau pelaku pembangunan dalam membuat suatu regulasi kebijakan yang tepat bagi Banda Aceh. Selain itu juga diharapkan peran dari aktor-aktor politik yang lain maupun masyarakat Banda Aceh sendiri dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Konsep kota madani di Banda Aceh berarti menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota yang madani, berbasis syari'at Islam, kota yang modern, yakni berarti bukan jauh dari nilai-nilai agama, akan tetapi tetap dilapisi dengan nuansa-nuansa yang islami.

Dalam proses menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani, telah ada beberapa program yang dibuat dan dijalankan. Tentu saja tetap berdasarkan pada tegaknya syari'at Islam sebagai pilar utamanya. Ada tujuh program yang dibuat, yaitu: Pertama, meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Misalnya saja dengan membentuk komite penguatan aqidah dan peningkatan syari'at Islam di

Banda Aceh, menerapkan program diniyah di sekolah umum dan membentuk lokasi hafiz Qur'an. Kedua, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, memperkuat ekonomi kerakyatan. Keempat, menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera. Kelima, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang Islami. Keenam, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik. Ketujuh, meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan kota Banda Aceh yang sesuai dengan visi dan misi tahun 2012-2017 yakni menjadikan Banda Aceh model kota madani.

Tantangan maupun hambatan tersebut dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal Banda Aceh. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, akan diperlukan kerjasama dan peran yang baik antara pihak pemerintah kota dan masyarakat Banda Aceh itu sendiri agar dapat terwujudnya Banda Aceh model kota madani yang sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh. Studi ini membahas mengenai latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh, serta program dan juga tantangannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Banda Aceh model kota madani telah tertuang dalam visi yang diikuti dengan tujuh misi pendukungnya untuk periode 2012-2017. Dalam menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani, pihak pemko (walikota dan wakil walikota) beserta muspida terkait merujuk pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Rasulullah meletakkan tiga tonggak dasar dalam membangun Madinah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani, ada beberapa program yang telah dijalankan. Namun, dalam menjalankan program-program tersebut tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi oleh seluruh elemen rakyat Banda Aceh. Salah satu syarat utama dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani adalah syariat Islam yang harus ditegakkan. Ada beberapa hal terkait latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh, program serta tantangannya.

Pertama, latar belakang dan konsep model kota madani Banda Aceh. Terkait dengan latar belakang, Banda Aceh merupakan sebuah kota yang penuh dengan toheran sejarah. Sejarah mencatat bahwa Banda Aceh adalah ibukota Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun oleh Sultan Johan Syah dan menjadi kota Islam tertua di Asia Tenggara. Selama berpuluh tahun, Aceh berada dalam masa konflik berkepanjangan. Selain itu, Aceh juga mendapat banyak hambatan dalam menegakkan syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah tersebut. Namun setelah bencana tsunami melanda tahun 2004, pada tahun 2005 muncul titik terang

dimana terwujudnya kesepakatan damai antara pihak pemerintah pusat dan GAM yang menandai babak baru bagi Aceh, yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Akibatnya timbul dampak yang cukup signifikan bagi Aceh. Tentunya sebagai ibukota dari Provinsi Aceh (Nanggore Aceh Darussalam), maka Banda Aceh juga tidak terkecuali dalam hal ini. Beberapa dampaknya dapat dilihat melalui tiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Dalam ruang lingkup sosial, dapat dilihat melalui diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh di Aceh melalui dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006. Selanjutnya dalam ruang lingkup ekonomi, yakni sebelum tsunami dan Mou Helsinki disepakati, kondisi perekonomian Aceh sangatlah miris terutama akibat dari konflik yang terjadi berkepanjangan. Namun setelah tsunami dan Mou Helsinki telah disepakati, kondisi perekonomian Aceh mulai membaik dimana infrastruktur seperti gedung pemerintahan, pasar-pasar, sekolah-sekolah sudah mulai dibangun.

Kemudian dari segi politik, peran GAM dalam proses reintegrasi menjadi penting untuk diperhatikan, terutama dengan masuknya kalangan GAM ke dalam pemerintahan lokal pasca pilkada langsung pada Desember 2006. Kemenangan tersebut telah membuka jalan bagi kalangan GAM, yang sebelumnya bukan hanya berada di luar melainkan juga berhadapan dengan pemerintah, untuk terlibat langsung dalam proses kebijakan publik di Aceh.

Roda kepemimpinan Aceh khususnya Banda Aceh sebagai

ibukotanya terus bergulir. Dalam setiap perjalanan panjang yang dilalui oleh para pemimpin dalam memimpin kota Banda Aceh agar menjadi lebih baik, kesempatan yang semakin terbuka lebar dimanfaatkan oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin kota Banda Aceh tadi (walikota dan wakil walikota) menuangkan pikiran-pikiran mereka ke dalam visi dan misi kota Banda Aceh yang nantinya akan dipergunakan sebagai pedoman dalam membangun kota Banda Aceh.

Terkait dengan konsep model kota madani Banda Aceh, kota Banda Aceh dalam membangun kotanya, berusaha berpedoman pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallah 'alayh wa Sallam di Madinah. Dalam paparan visi dan misi pencalonan yang Mawardy Nuridin dan Illiza Sa'aduddin Djamal sebutkan, bahwasanya konsep Banda Aceh pada masa itu laksana merujuk pada pola Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah setelah hijrah dari Mekkah. Rasul membangun kota di sebuah kawasan yang semula bernama Yastrib menjadi Madinah -berarti kota. Cendekiawan Nurcholis Madjid menyebutkan kota Madinah ini berasal dari maddaniyah (peradaban) (Visi dan Misi: Terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani, 2012).

Kemudian, mereka juga menyebutkan bahwa dalam beberapa literatur yang ada, Rasulullah meletakkan tiga tonggak masyarakat madani. Di antaranya yaitu beliau memperkokoh hubungan kaum muslim dengan Tuhannya, memperkuat hubungan intern umat Islam yakni dengan

mempersaudarakan kaum pendatang dari Mekah (kaum Muhajirin) dengan penduduk asli Madinah (kaum Anshor), dan juga mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang diluar Islam. Kesimpulannya maka dapat melahirkan karakter masyarakat yang berakhlak, persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatan-ikatan kesukuan, menegakkan hak asasi manusia, anti-otoriterisme, memiliki ruang publik yang luas, dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan. Selain itu masyarakatnya taat hukum, tidak barbarian, toleran dalam perbedaan, dan memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Seperti itulah kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah.

Tidak berbeda jauh dengan hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bachtiar - Asisten I kantor pemerintah kota Banda Aceh - beliau mengatakan bahwasanya di Aceh ini adalah mayoritas umat Islam. Sehingga sudah selayaknya penduduk Aceh yang bermayoritas Islam berkomitmen menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Madani kan diartikan secara Islam yang kita pahami ini adalah kota yang berperadaban, kota yang taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada pemimpin, yang keempat taat kepada hukum. Hal itu merupakan kota yang madani. Selain itu juga penuh toleransi, menghargai semua komponen kehidupan yang ada di Aceh (Bachtiar, 2016).

Dalam membangun kotanya, Banda Aceh berpedoman pada apa yang dilakukan Rasulullah di

Madinah, seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah. Pertama, memperkokoh hubungan kaum muslim dengan Tuhannya. Di Banda Aceh, hal tersebut dapat dilihat melalui banyaknya masjid dan juga banyak dilakukannya kegiatan keagamaan seperti ceramah, pengajian, ataupun perwiritan, guna menanamkan rasa cinta kepada Tuhannya. Kedua, memperkuat hubungan intern umat Islam. Dalam hal ini dapat dilihat di Banda Aceh, bahwa pendatang yang bukan berasal dari Aceh yang beragama muslim dapat diterima dengan baik, karena sesama umat muslim itu bersaudara. Ketiga, mengatur hubungan Islam dengan orang-orang diluar Islam.

Hal tersebut dapat dilihat di Banda Aceh dari terjalinnya hubungan yang baik antara warga asli yang memang Islam dan juga warga pendatang yang non muslim. Maka munculnya konsep mengenai Banda Aceh sebagai model kota madani telah diupayakan agar selaras pada konsep yang dijalankan oleh Rasulullah di Madinah, walaupun masih membutuhkan proses untuk dapat mencapai taraf tersebut.

Kedua, para aktor politik yang terlibat berupaya agar program yang dijalankan tetap berdasarkan syariat Islam. Adapun program-program yang mereka buat dan jalankan merupakan realisasi dari visi dan misi Banda Aceh 2012-2017, sebagai berikut (Program-program pembangun Banda Aceh Model Kota Madani, 2015): *Misi 1*, Meningkatkan Kualitas Pengamalan Agama Menuju Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah, dimana beberapa program yang dijalankan yakni Pembentukan KPA-PAI (Komite Penguatan Aqidah

Akhlak dan Peningkatan Amalan Islam); Mengembangkan Pendidikan Diniyah di semua jenjang pendidikan; Pembinaan Hafizh dan Hafizhah. *Misi 2*, Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, salah satunya yaitu pihak pemko Banda Aceh telah mengeluarkan E-Kinerja yang merupakan salah satu program untuk mengeluarkan dan melakukan penilaian kinerja dan satuan kerja, monitoring kinerja dilakukan secara online dan real time. *Misi 3*, Memperkuat Ekonomi Kerakyatan, beberapa programnya yakni Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM sebesar 5 Milyar), mengadakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM sebesar 8,6 Milyar), Mengalokasikan Dana Gampong (ADG sebesar 9 Milyar). *Misi 4*, Menumbuhkan Masyarakat yang Berintelektualitas Sehat dan Sejahtera, beberapa programnya yaitu mengadakan Program pendidikan tanpa hambatan biaya, Beasiswa bagi masyarakat miskin, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Wajib belajar 12 tahun. Di bidang kesehatan yaitu tersedia layanan gratis bagi masyarakat miskin dan pelayanan kesehatan dasar, dibentuk program layanan kesehatan peduli remaja pada seluruh puskesmas. *Misi 5*, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktrur Pariwisata Yang Islami, salah satunya Pemerintah Kota Banda Aceh akan menjalin kerjasama dengan Asosiasi Travel Asia Pasifik atau *Pasific Asia Travel Assosition* (PATA). Walikota Banda Aceh, Illiza mengatakan bahwa konsep wisata yang akan dibangun nantinya adalah wisata yang merujuk pada konsep yang menjadikan Banda Aceh sebagai

miniatur kota Mekkah di Indonesia. *Misi 6*, Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Ranah Publik, misalnya Pembentukan Women Development Centre (WDC) pada tahun 2007, Menginisiasi Musyawarah Rancangan Aksi Perempuan (Musrena) sejak tahun 2007. *Misi 7*, Meningkatkan Peran Generasi Muda Sebagai Kekuatan Pembangunan Kota, misalnya melakukan Pembinaan 67 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2013, Melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda dan OSIS Kota Banda Aceh.

Ketiga, para aktor politik masih memiliki kendala dan tetap harus berupaya agar dapat mewujudkan Banda Aceh model kota madani. Berbagai kendala maupun tantangan yang dihadapi tersebut antara lain yaitu masih harus ditingkatkan lagi kualitas pengamalan agama, yakni tegaknya syariat Islam. Seperti berita yang terdapat pada *Harian Waspada* beberapa bulan lalu, kasus Gay malah menjerat para pelajar Aceh. Kelompok gay di kota Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya (*Harian Waspada*, 2016). Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat fondasi utama terwujudnya Banda Aceh model kota madani adalah harus tegaknya syariat Islam dalam diri setiap elemen masyarakat Aceh. Kemudian dari segi fasilitas publik juga masih harus dilakukan pembenahan, dimana beberapa fasilitas seperti fasilitas bermain anak di Taman Sari Banda Aceh, Gapura Pasar Aceh, dan sejumlah sarana lain, harus dilakukan perbaikan dan dirawat agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Banda

Aceh dan segenap jajaran dinas yang terkait. Ketergantungan dari segi ekonomi harus segera diatasi. Selain itu masih rendahnya tingkat kesadaran atau mentalitas masyarakat misalnya saja dalam pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi, serta tingkat penegakan hukum yang masih rendah.

SIMPULAN

Politik Pembangunan Islam Terhadap Model Kota Madani merupakan cara-cara yang digunakan oleh para aktor politik (dalam hal ini pihak pemko dan muspida kota Banda Aceh) dalam konteks pembangunan yang dilakukan dengan cara-cara Islam. Model kota madani Banda Aceh maupun programnya telah dibuat dan dijalankan agar dapat tegaknya syariat Islam secara kaffah di bumi Serambi Mekkah tersebut. Namun, tetap terdapat tantangan maupun hambatan yang dihadapi oleh pihak pemko, muspida terkait dan seluruh elemen masyarakat Banda Aceh khususnya dalam menjadikan Banda Aceh model kota madani. Terdapat tiga hal penting dalam politik pembangunan Islam terhadap model kota madani di Banda Aceh: pertama, pihak pemko Banda Aceh yakni Walikota dan Wakil Walikota yang menggagas ide mengenai Banda Aceh model kota madani, dimana konsepnya merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah; Kedua, para aktor politik yang terlibat berupaya agar program yang dijalankan tetap berdasarkan syariat Islam; Ketiga, para aktor politik masih memiliki kendala dan tetap harus

berupaya agar dapat mewujudkan Banda Aceh model kota madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2015). *Program-program pembangun Banda Aceh Model Kota Madani*. Banda Aceh
- Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh. (2013). *Mawardy Nurdin Minta RPJM Kota BandaAceh Tiru Konsep Rasulullah*. Diunduh di <http://dprk-bandaaceh.go.id/berita-38-mawardy-nurdin-minta-rpjm-kota-banda-aceh-tiru-konsep-rasulullah.html> tanggal 14 Desember 2015.
- Komisi Independen Pemilihan Banda Aceh. (t.t). *Visi dan Misi: Terwujudnya Banda Aceh Model Kota Madani*. Banda Aceh.
- Nurdin, M. 2013. "Konsep Membangun Banda Aceh Model Kota Madani". Diunduh di <http://mawardy-nurdin.blogspot.co.id/2013/07/banda-aceh-model-kota-madani.html> tanggal 15 Desember 2015.
- Warjio. (2013). *Politik Pembangunan Islam: Pemikiran dan Implementasi*. Medan: Perdana Publishing.
- Wawancara Bachtiar S.Sos, Asisten I Bidang Pemerintahan di Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh, 26 Januari 2016.
- . (2016). *Traffic Light Kota Banda Aceh Terabaikan*. Waspada. Medan. 4 April. Hlm. C7.